



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
BULAN APRIL 2019**

**Disusun Oleh:
Badan Pelaksana
Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH)**

**Disampaikan kepada
Dewan Pengawas**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OUTLINE

Latar Belakang

Tujuan

Kinerja BPKH

Kinerja Bidang Secara Umum

Kegiatan *Expose Media* dan Rapat dengan *Stakeholder*

Manajemen Risiko BPKH *Wide*

Laporan Hukum dan Kepatuhan

Laporan Hasil Audit Internal BPKH

Laporan Keuangan BPKH

Penutup

Lampiran 1 Sebaran Nilai Manfaat BPS-BPIH

Lampiran 2 Rekap Kinerja dan Penyerapan Anggaran

Lampiran 3 Kegiatan non Anggaran

Lampiran 4 Rencana Bulan April

Lampiran 5 Laporan Manajemen Risiko

Lampiran 6 Laporan Hukum dan Kepatuhan

Lampiran 7 Laporan Keuangan

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
BULAN APRIL 2019**

I. Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan April 2019 merupakan amanah dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pelaksana BPKH diwajibkan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji yang berisi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

II. Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan April 2019, meliputi antara lain:

- a. memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- b. melakukan analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- c. sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dalam pengelolaan keuangan haji.

III. Kinerja BPKH

Sampai dengan bulan April 2019, secara umum masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun sebelumnya.

Dana kelolaan BPKH s.d. bulan April 2019 adalah sebesar 111,46 triliun, kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target dana kelolaan mencapai 96,44%. Dana kelolaan tersebut turun sebesar Rp5,68 triliun dibandingkan dengan bulan Maret 2019 yang tercatat sebesar Rp117,14 triliun. Penurunan ini disebabkan pada tanggal 4 April 2019 telah dilakukan pemindahbukuan dana ke Rekening Kementerian Agama untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019. Dana Kelolaan Haji pada bulan April 2019 terkonsentrasi pada penempatan sebesar 55,81% dari total dana kelolaan atau setara Rp62,21 triliun dan Investasi 44,19% dari total dana kelolaan atau setara dengan Rp49,25 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Maret 2019), komposisi portofolio penempatan mengalami perubahan/penurunan dari 57,65% menjadi 55,81%, hal ini disebabkan dana penempatan turun sebagai dampak dari pembayaran BPIH tahun 2019.

Pada Tabel 3.1 di bawah, digambarkan target bisnis BPKH tahun 2019 dengan pencapaian sampai dengan bulan April 2019.

Tabel 3.1. Pencapaian Target Bisnis BPKH s.d. bulan April 2019

No.	Deskripsi	Target 2019	Target s.d. April 2019	Realisasi s.d. April 2019	%	Deviasi pencapaian (%)
1.	Total Dana Kelolaan	121,3 triliun	115,57 triliun	111,46 triliun	96,44	(3,54)
2.	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah Haji Baru					
	a. Reguler	680 ribu orang	226 ribu orang	188 ribu orang	83,19	(16,81)
	b. Khusus	-	-	4,9 ribu orang	-	-
3.	Tambahan Dana Kelolaan Baru	16,25 triliun	5,41 triliun	5,39 triliun	99,63	(0,37)
	a. Reguler	16,25 triliun	5,41 triliun	4,69 triliun	86,69	(13,31)
	b. Khusus	-	-	70,67 miliar	-	-
4.	Pendapatan	7,22 triliun	2,40 triliun	2,09 triliun	87,08	(12,92)
	a. Penempatan Dana	2,96 triliun	986 miliar	1.115,18 miliar	113,10	13,10
	i. Giro dan Tabungan	14,29 miliar	4,76 miliar	10,58 miliar	222,27	122,27
	ii. Deposito	2,86 triliun	953 miliar	1.082,64 miliar	113,60	13,60
	iii. Dana DAU	88,66 miliar	29,55 miliar	21,95 miliar	74,28	(25,72)
	b. Investasi	4,26 triliun	1,42 triliun	975,61 miliar	68,70	(31,30)
	i. Surat Berharga	3,68 triliun	1,22 triliun	935,58 miliar	76,69	(23,31)
	ii. Emas	-	-	-	-	-
	iii. Investasi Langsung	92,9 miliar	30,96 miliar	-	-	-
	iv. Investasi Lainnya	377,2 miliar	125,73 miliar	-	-	-
	v. Dana DAU	111,66 miliar	37,22 miliar	40,03 miliar	107,55	7,55
5.	Pengeluaran					
	a. BPIH (indirect cost)	7,04 triliun	-	-	-	-
	b. Virtual Account	1,2 triliun	-	-	-	-
	c. Kemaslahatan	177,13 miliar	59,04 miliar	3,84 miliar	6,50	(93,50)
	d. Operasional BPKH	282,44 miliar	94,14 miliar	29,26 miliar	31,08	(68,92)

Tabel 3.2 di bawah, merupakan informasi mengenai jumlah penambahan calon jemaah haji baru secara akumulatif s.d. bulan April 2019 yang berjumlah 187.993 orang untuk calon Jemaah haji reguler dan 4.999 orang untuk calon Jemaah haji khusus. Pencapaian target secara proporsional adalah sebesar 28,38% dari target total 2019 sebanyak 680.000 orang. Namun apabila dibandingkan dengan pencapaian pada target s.d. bulan April 2019, pencapaiannya sebesar 83,19%. Calon jemaah haji baru tersebut dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu calon jemaah haji reguler dan calon jemaah haji khusus.

Tabel 3.2. Penambahan Jumlah Calon Jemaah Haji Baru s.d. bulan April 2019
(ribu orang)

No	Jenis CalHaj	Target 2019	Jan s.d. Apr 2019		
			Target	Real	%
1	Reguler	680	226	188	83,19
2	Khusus	-	-	4,9	-
	Total	680		192,9	28,38

Jumlah penambahan dana kelolaan dari setoran awal calon jemaah haji baru tersebut, baik jemaah haji reguler maupun khusus, secara akumulatif s.d. bulan April 2019 adalah sebesar Rp5,39 triliun dengan pencapaian proporsional sebesar 33,17% dari target pertambahan dana kelolaan dari setoran awal total tahun 2019 sebesar Rp16,25 triliun.

Tabel 3.3. Penambahan Dana Kelolaan Baru BPKH s.d. bulan April Tahun 2019

No	Jenis CalHaj	Target 2019	Bulan April 2019		
			Target	Real	%
1	Reguler (Rp triliun)	16,25	5,41	4,69	86,69
2	Khusus (Rp miliar)	-	-	70,67	-
	Total (triliun)	16,25		5,39	33,17

Merujuk pada target pencapaian pendapatan BPKH tahun 2019, target total pendapatan dari nilai manfaat adalah sebesar Rp7,22 triliun. Jumlah tersebut berasal dari target nilai manfaat hasil investasi pada surat-surat berharga, emas, dan investasi lainnya dengan jumlah sebesar Rp4,26 triliun serta dari target hasil penempatan pada giro, tabungan, dan deposito di BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sebesar Rp2,96 triliun. Total target pendapatan dimaksud sudah termasuk target pendapatan nilai manfaat yang diperoleh dari DAU (Dana Abadi Umat), baik dari pendapatan penempatan dana di BPS-BPIH (Rp88,66 miliar) maupun dari pendapatan investasi (Rp111,66 miliar).

Total realisasi pendapatan nilai manfaat yang diperoleh BPKH berasal dari penempatan dana dan investasi periode s.d. bulan April 2019 adalah sebesar Rp2,09 triliun, dengan persentase pencapaian nilai manfaat BPKH *wide* sebesar 28,95% (dari total target nilai manfaat Rp7,22 triliun selama tahun 2019). Realisasi nilai manfaat untuk penempatan pada giro, tabungan, dan deposito (termasuk DAU) di BPS-BPIH adalah sebesar Rp1,11 triliun atau 113,10% dari target bulan April 2019 sebesar 986 miliar, sedangkan realisasi nilai manfaat untuk investasi adalah sebesar Rp975,61 miliar (termasuk DAU) atau 68,70% dari target bulan April 2019 sebesar Rp1,22 triliun.

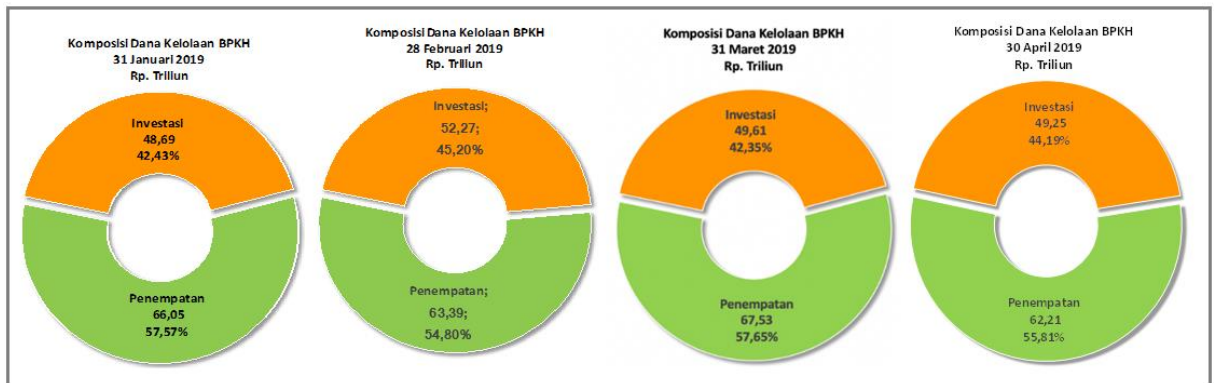
Rincian target dan realisasi nilai manfaat BPKH periode Januari s.d. April 2019 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah.

Tabel 3.4. Pendapatan BPKH dari Nilai Manfaat s.d. bulan April 2019

(Rp miliar)

No	Penempatan/ Investasi	Target 2019	Jan s.d. Apr 2019		
			Target	Real	%
1	Giro & Tabungan	2,96 triliun	4,76	10,58	222,27
2	Deposito		953,00	1.082,64	113,60
3	Deposito DAU		29,55	21,95	74,28
Total s.d. April 2019			986	1.115,18	113,10
4	Surat Berharga	4,26 triliun	1.220,00	935,58	76,69
5	Investasi Langsung		30,96	-	-
6	Emas		-	-	-
7	Investasi Lainnya		125,73	-	-
8	SBSN DAU		37,22	40,03	107,55
Total s.d. April 2019			1.420	975,61	68,70
Total s.d. April 2019		7,22 triliun	2,40 triliun	2,09 triliun	87,08
Total		7,22 triliun		2,09 triliun	28,95

Pada grafik 1 di bawah ini, tergambar mengenai komposisi dana kelolaan berdasarkan kategori Penempatan dan Investasi dari bulan Januari-April 2019.

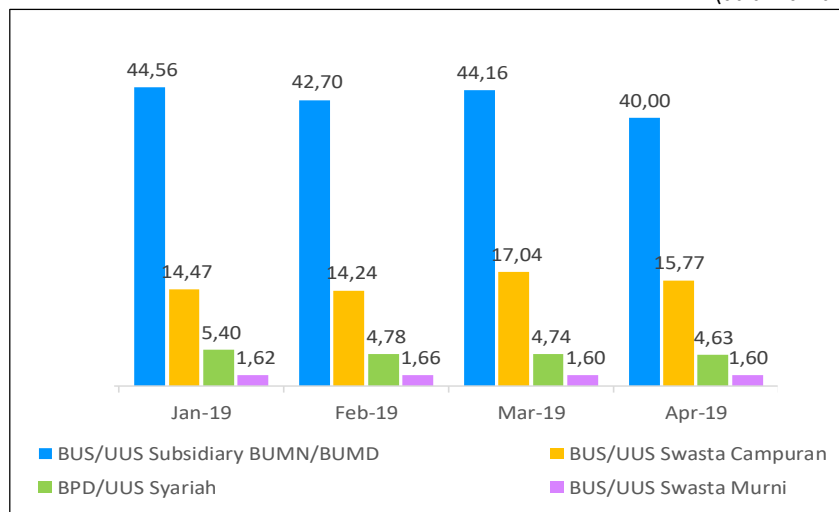


Grafik 1. Komposisi Dana Kelolaan BPKH Periode Jan-Apr 2019

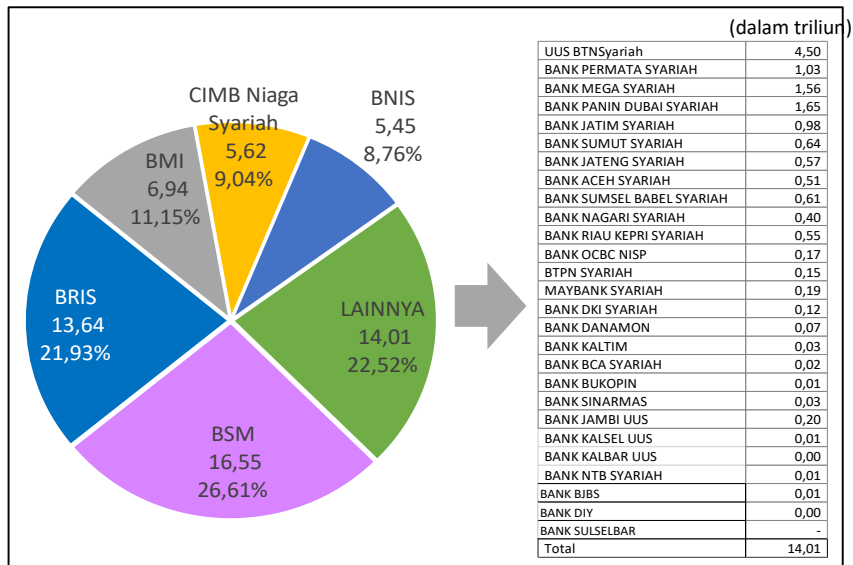
Pada bulan April 2019, penempatan mengalami tren turun sebesar Rp5,32 triliun apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2019, penurunan ini disebabkan adanya pembayaran BPIH kepada Kementerian Agama. Tren penurunan juga terjadi di Investasi, dimana pada bulan April 2019 investasi mengalami tren turun sebesar Rp340 miliar yang disebabkan adanya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang jatuh tempo sebesar Rp1 triliun. Pada bulan yang sama, Investasi melakukan pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp641,59 miliar.

Mengenai penempatan dana kelolaan, BPKH menempatkan dananya kepada *Bank Counterparty* yang dikategorikan menjadi BUS/UUS *subsidiary* BUMN, BUS/UUS swasta murni, BUS/UUS swasta campuran, dan BPD/UUS Syariah. Porsi terbesar dari dana kelolaan BPKH ditempatkan pada BUS/UUS *Subsidiary* BUMN yang mencapai Rp40 triliun. Porsi dana kelolaan pada 5 bank terbesar adalah Bank Syariah Mandiri sebesar Rp16,55 triliun, Bank BRI Syariah sebesar Rp13,64 triliun, Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp6,94 triliun, UUS Bank CIMB Syariah Rp5,62 triliun, dan Bank BNI Syariah Rp5,45 triliun. Sedangkan sisa dari dana kelolaan sebesar Rp14,01 triliun tersebar di 27 bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembangunan Daerah Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPD UUS.

(dalam triliun)



Grafik 2. Penempatan berdasarkan Kategori Bank



Grafik 3. Penempatan berdasarkan Bank Counterparty

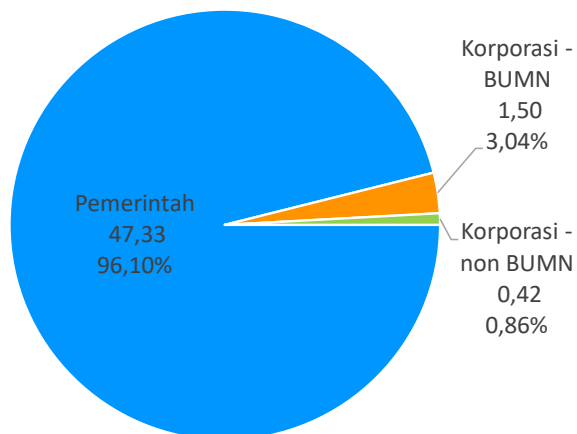
Tabel 3.5 Sebaran Nilai Manfaat pada BPS-BPIH s.d. April 2019

(dalam triliun)

No	Bank	Triwulan I	April 2019	Total
1	Bank Syariah Mandiri	218,56	77,34	295,90
2	BRI Syariah	188,84	72,22	261,06
3	BNI Syariah	82,40	25,87	108,27
4	Bank Muamalat Indonesia	91,33	30,69	122,02
5	Bank Tabungan Negara Syariah	54,27	24,62	78,89
6	Bank Lainnya	172,11	76,92	249,03
	Total	807,51	307,67	1.115,18

Data sebaran perolehan nilai manfaat dari BPS-BPIH terbagi kepada 32 Bank, dimana lima bank tertinggi secara akumulatif sampai dengan bulan April 2019 dengan rincian per bulannya seperti pada tabel 3.5.

Pada aktivitas investasi, BPKH menginvestasikan dana kelolaan dalam bentuk Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah. Total dana yang diinvestasikan sampai dengan bulan April 2019 mencapai Rp47,33 trilion atau 96,10% dari total investasi.



Grafik 4. Investasi berdasarkan Penerbit/Mitra Investasi

Selain menempatkan dananya pada Investasi, BPKH menempatkan dananya pada produk Bank berupa Giro, Tabungan, dan Deposito. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2017, bahwa penempatan dana setidaknya 50% dari jumlah total dana kelolaan. Jumlah tersebut masih belum dapat terlaksana, karena jumlah dana penempatan memiliki porsi sebesar 57,1%.

**Tabel 3.6. Distribusi Nilai Manfaat DAU untuk Program Kemaslahatan
s.d. bulan April Tahun 2019**

No	Kelompok <i>Asnaf</i>	Target 2019	April 2019		
			Target s.d. April 2019	Real	%
1	Pendidikan & Dakwah	2,55	0,64	2,06	322,53
2	Pelayanan Haji	119,58	29,90	0,49	1,65
3	Sarana/Prasarana Ibadah	14,25	3,56	0,60	16,92
4	Kesehatan	9,45	2,36	0,11	2,36
5	Pemberdayaan Ekonomi	-	-	-	-
6	Sosial Keagamaan	7,40	1,85	0,58	31,23
7	Rehab Palu & Donggala	21,25	5,31	-	0,00
8	Bantuan Bencana	2,66	0,67	-	0,00
	Total	177,13	44,29	3,84	8,68

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) mengalami perubahan target kelompok sasaran, dari sebelumnya 8 (delapan) kelompok atau *asnaf* pada awal terbentuknya BPKH, menjadi 6 (enam) kelompok pada saat direalisasikan tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019. Enam *asnaf* yang menjadi sasaran dalam program penyaluran nilai manfaat dari DAU adalah: Pendidikan, Dakwah, dan Pelayanan Haji; Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; Sosial Keagamaan; Rehab Palu dan Donggala; serta Bantuan Bencana. Pada bulan April 2019, belum ada kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan, sehingga laporan distribusi DAU untuk kegiatan kemaslahatan masih sama dengan laporan sebelumnya. Beberapa *asnaf* yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah: Pendidikan, Dakwah dan Pelayanan Haji; Sarana/Prasarana Ibadah; Kesehatan; dan Sosial Keagamaan.

**Tabel 3.7. Distribusi Nilai Manfaat (NM) melalui *Virtual Account* (VA)
s.d. bulan April Tahun 2019**

No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Triwulan I/2019		
				Target	Real	%
1	Total NM	Rp6,07 triliun	Rp5,73 triliun	Rp1,80 triliun	Rp1,59 triliun	88,33
2	NM yg distribusikan	20% dari NM 2018	Rp777,39 miliar	-	Rp499,95 miliar	-
3	Total VA	-	-	-	4.132.786 Rekening	-
	a. Reguler	-	-	-	4.041.702 Rekening	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	19.006 Rekening	-
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	4.022.696 Rekening	-
	b. Khusus	-	-	-	91.084 Rekening	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	146 Rekening	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	90.938 Rekening	-
4	NM per VA	-	-	-	Rp674.224,-	-
	a.Regular	-	-	-	Rp212.148,-	-

No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Triwulan I/2019		
				Target	Real	%
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	Rp94.288,-	-
	Set. Awal Rp25 juta			-	Rp117.860,-	-
	b. Khusus	-	-	-	Rp462.076,-	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	Rp198.033,-	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	Rp264.043,-	-

Nilai manfaat tahun 2018 yang didistribusikan kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual total adalah sebesar Rp777,39 miliar, dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp499,95 miliar, didistribusikan pada tanggal 7 Februari 2019 kepada 4.041.702 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu reguler dan 91.084 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu khusus. Pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu reguler mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp94.288,- (untuk setoran awal Rp20 juta) dan Rp117.860,- (untuk setoran awal Rp25 juta); sedangkan pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu khusus mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp198.033,- (untuk setoran awal \$3000) dan Rp264.043,- (untuk setoran awal \$4000). Tahap kedua sisanya Rp277,44 miliar akan didistribusikan kepada VA milik calon haji jemaah tunggu setelah pelaksanaan audit BPK untuk kinerja BPKH tahun 2018 selesai. Sedangkan distribusi nilai manfaat tahun 2019 ke rekening virtual calon haji jemaah tunggu akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah besaran nilai manfaat tahun 2019 diperoleh dan dicatat pada neraca BPKH.

IV. Kinerja Bidang Secara Umum

Kinerja masing-masing bidang diukur melalui dua aspek, yaitu: persentase pencapaian terhadap rencana output dan persentase penyerapan atas rencana anggaran. Kombinasi antara pencapaian output yang optimal dengan penyerapan anggaran yang optimal juga, diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja organisasi BPKH *wide*.

Berdasarkan hasil *self assessment* kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, sampai dengan bulan April 2019 terdapat bidang yang mencapai output 100% yaitu Sekban. Sedangkan pencapaian kinerja dari bidang-bidang lainnya bervariasi antara 27% hingga 91%. Untuk penyerapan anggaran selama periode yang sama, penggunaan anggarannya pun bervariasi antara 1% hingga 88% dari anggaran kegiatan-kegiatan yang proporsional diimplementasikan pada periode tersebut.

Pada skala BPKH *wide*, pencapaian output sampai dengan bulan April 2019 adalah sebesar 73,8%, sedangkan tingkat penyerapan anggarannya adalah sebesar 27%. Rekap kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2, sedangkan rincian kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 4.1. Pencapaian Output per Bidang s.d. bulan April Tahun 2019

No	Bidang	Target 2019	Real Triwulan I	Real April 2019	%
1	A1	6	1	4	83,3
2	A2	38	10,5	4,9	40,5
3	A3	11	2	1	27,3
4	A4	46	38	4	91,3

No	Bidang	Target 2019	Real Triwulan I	Real April 2019	%
5	A5	26	11	7	69,2
6	A6	57	9	1	17,5
7	A7	11	2,5	2,6	46,4
8	Audit Internal	9	0	4	44,4
9	Sekban*	40	35	5	100
10	Sekdewas*	108	65	25	83,3
	Total	315	174	58,5	73,8

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kegiatan yang terdapat pada Sekretariat Badan dan Sekretariat Dewan Pengawas bersifat insidentil (tidak terencana) seperti kegiatan rapat, pengadaan ATK, pengadaan souvenir, kalender, dan media publikasi. Sehingga realisasi pencapaian output dalam laporan adalah pemenuhan atas target pada bulan berjalan. Oleh karena itu, pencapaian target output mendekati 100%.

Tabel 4.2. Penyerapan Anggaran per Bidang s.d. bulan April Tahun 2019

(Rp juta)

No	Bidang	Target 2019	Real Triwulan I 2019	Real April 2019	%
1	A1	1.017	346	105	44,3
2	A2	4.285	437	0	10,2
3	A3	683	32	0	4,7
4	A4	1.577	913	486	88,7
5	A5	182.769	33.472	23.088	30,9
6	A6	20.797	213	13	1,1
7	A7	3.351	14	499	15,3
8	Audit Internal	1.577	913	111	64,9
9	Sekban	4.589	769	88	18,7
10	Sekdewas	12.068	1.306	52	11,3
	Total	232.713	38.414	24.442	27,0

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam RKAT 2019, setiap bidang mempunyai *non budgetary activities*. Pada periode Januari s.d. April 2019, jumlah total *non budgetary activities* BPKH adalah sebanyak 79 kegiatan dan yang telah diselesaikan sebanyak 76 kegiatan atau 96% dari tugas yang diberikan. Rincian aktivitas yang tidak mempunyai anggaran dan telah diselesaikan hingga April 2019 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKH pada Bulan Mei 2019 adalah total sebanyak 43 kegiatan dengan dukungan anggaran total sebesar Rp29,38 miliar. Rincian rencana kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

V. Kegiatan *Expose Media* dan Rapat dengan *Stakeholder*

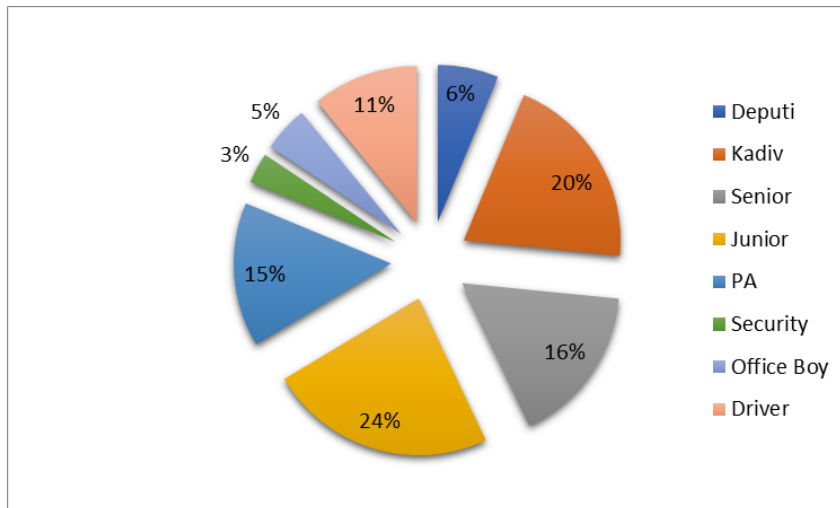
Beberapa kegiatan *expose media* dan rapat dengan para *stakeholder* rutin dilakukan sebagai cara meningkatkan *Corporate Branding* dan menjaga hubungan baik. Kegiatan-kegiatan terkait media dan interaksi dengan *stakeholder* sampai dengan bulan April 2019 adalah sebagai berikut:

- Media *Briefing* dilaksanakan 1 kali
- Rapat dengan DPR dilaksanakan 4 kali

- c. Rapat dengan Kementerian Agama dilaksanakan 1 kali
- d. Media massa (CNBC, TV One, iNews, Kompas, Republika, Portal Online, Detik) dilaksanakan 6 kali.

VI. SDM BPKH *Wide*

Sampai dengan bulan April 2019, jumlah pegawai BPKH saat ini adalah 128 orang. Jumlah tersebut tersebar ke dalam berbagai posisi antara lain Deputi, Kepala Divisi, Staf Pelaksana (Senior dan Junior), *Personal Assistant*, *Security*, *Office Boy*, dan *Driver*. Sebaran data pegawai BPKH dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Grafik 6. Sebaran Data Pegawai BPKH per bulan April 2019

Berdasarkan diagram di atas, sebaran data pegawai terlihat merata pada masing-masing jabatan. Namun, komposisi terbesar dari jumlah pegawai BPKH adalah staf Junior.

Proses rekrutmen masih tetap dilakukan walaupun masih terdapat kendala mengenai jumlah kandidat yang masih kurang memenuhi target. Namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu pengumuman rekrutmen. Jabatan yang masih belum terisi tersebut adalah jabatan Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala Divisi Pengadaan. Proses rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi terbuka di *website* resmi BPKH yang sampai dengan saat ini sudah memasuki tahapan proses asesmen.

Pada bulan April 2019 *turnover* pegawai adalah 0%, yang berarti tidak ada pegawai yang keluar di bulan tersebut. Namun, pada periode Triwulan I *turnover* pegawai adalah sebesar 1,83% atau sebanyak 7 orang.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai penghargaan bagi para pegawai BPKH, bidang SDM telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang telah terlaksana di bulan April 2019 adalah Pelatihan *Mastering Business Strategy & Portfolio* yang diikuti oleh 4 orang pegawai bidang Perencanaan dan Pengembangan dan pelatihan *Service Excellence* yang diikuti 4 orang *security* dan 6 orang *office boy*. Kegiatan pelatihan akan terus dilakukan bidang SDM demi terciptanya pegawai yang memiliki kompetensi yang mumpuni.

VII. Manajemen Risiko BPKH *Wide*

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPKH dapat terekspos pada beberapa risiko. Beberapa risiko utama yang wajib dikelola antara lain:

- BPKH terekspos risiko kredit dari aktivitas penempatan dan investasi. Pada April 2019 total dana kelolaan BPKH mencapai Rp111,46 triliun, kondisi ini turun sebesar Rp5,68 triliun dibandingkan Maret 2018 yang tercatat sebesar Rp117,14 triliun. Penurunan ini disebabkan pada awal April (4 April 2019) telah dilakukan pemindahbukuan dana ke Rekening Kementerian Agama untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2019. Dana Kelolaan Haji pada bulan April 2019 terkonsentrasi pada penempatan sebesar 55,81% dari total dana kelolaan atau setara Rp62,21 triliun dan Investasi 44,19% dari total dana kelolaan atau setara Rp49,25 triliun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Maret 2019), komposisi portofolio mengalami perubahan, dimana konsentrasi pada penempatan turun dari 57,65% menjadi 55,81%, hal ini disebabkan dana penempatan turun sebagai dampak dari pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2019.
- Risiko pasar BPKH muncul dari aktivitas penerimaan calon haji khusus, pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus dan reksadana. Pada April 2019, posisi devisa *netto* BPKH adalah *Long*. Dengan menggunakan Posisi Devisa Neto tersebut, maka apabila dilakukan *stress test* terhadap perubahan nilai tukar dengan skenario terjadi kenaikan/penurunan $\pm 1\%$ terhadap nilai tukar *baseline* (30 April 2019: USD14.215; SAR3.790,47), maka potensi keuntungan/kerugian yang akan terjadi adalah -Rp32,86 milyar sd Rp532,86 miliar. Berdasarkan data yang ada, NAB Reksadana Arafah memiliki tren naik. Posisi NAB pada tanggal 21 April 2019 tercatat sebesar 1.016,36 atau tumbuh 0,60% dalam 1 bulan menjadi 1.022,44 (21 Mei 2019).
- Risiko likuiditas BPKH termitigasi dengan baik, dimana BPKH mampu memenuhi kewajiban untuk menyediakan 2 kali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan mampu menyediakan kebutuhan USD untuk kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini. Upaya pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing telah dilakukan oleh BPKH dengan lelang pengadaan valuta asing USD (TT) sesuai kebutuhan.
- Risiko kepatuhan muncul akibat masih belum terpenuhinya komposisi antara investasi dan penempatan. Pada PP No.5 tahun 2018, komposisi yang wajib dipenuhi adalah 50% untuk penempatan dan 50% untuk investasi. Namun sampai dengan realisasi akhir April 2019 komposisi investasi (44,19%) dan penempatan (55,81%).
- Risiko stratejik BPKH muncul karena adanya deviasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Keseluruhan parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian target belum menunjukkan pencapaian yang maksimal. Pada April 2019, parameter Dana Kelolaan mencapai 96,44%, Total Jemaah 85,14% dan Nilai Manfaat 67,95%.

Laporan Manajemen Risiko BPKH pada triwulan pertama tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5.

VIII. Laporan Hasil Audit Internal BPKH

Sampai dengan 30 April 2019, Bidang Audit Internal telah menerbitkan tiga Laporan Hasil Audit dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 pada Bidang Operasional dan Bidang SDM dan Kemaslahatan, Nomor LHP: 01/LHP/AI/02/2019, tanggal 6 Februari 2019.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Dana Setoran Awal tahun Anggaran 2018, Nomor LHP: 02/LHP/AI/02/2019, tanggal 6 Februari 2019.
3. Laporan Hasil Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Program Kemaslahatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 telah diterbitkan dengan Nomor: 01/LHA/AI/04/2019 tanggal 29 April 2019.

Mengacu pada RKAT Bidang Audit Internal, kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal dilakukan per semester. Oleh karena itu, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal baru dapat dilaporkan dalam Laporan Semesteran BPKH.

IX. Laporan Bidang Hukum dan Kepatuhan

Sampai dengan bulan April 2019, bidang Hukum dan Kepatuhan telah menyampaikan progres mengenai rencana penyusunan PBPBH sebagai berikut:

No	Nama Peraturan	Pemrakarsa	Progres		Posisi Terakhir
			Harmonisasi	Penyusunan	
1.	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM dan Umum		√	Pemrakarsa
2.	Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Operasional	√		Pemrakarsa (revisi)
3.	Pengelolaan Kekayaan berupa Barang yang Dapat dinilai dengan Uang	Kepuangan	√		Pemrakarsa (revisi)
4.	Pedoman Pengedalian Keuangan dan Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pengelolaan Likuiditas	Kepuangan	√		Pemrakarsa (revisi)
5.	Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Haji	Kepuangan		√	Pemrakarsa
6.	Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja, Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban BPKH	Kepala dan Kepuangan		√	Pemrakarsa
7.	Pedoman Pengawasan dan Pemantauan atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji	Dewan Pengawas		√	Pemrakarsa

No	Nama Peraturan	Pemrakarsa	Progres		Posisi Terakhir
			Harmonisasi	Penyusunan	
8.	Tata Cara Pemberian Persetujuan atas Renstra dan RKAT Pengelolaan Keuangan Haji serta Penempatan dan/atau Investasi Haji	Dewan Pengawas		√	Pemrakarsa
9.	Usulan perubahan BPKH. No. 7/2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat	Kemaslahatan		√	Pemrakarsa

Laporan bidang Hukum dan Kepatuhan secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 (enam).

X. Laporan Keuangan BPKH

Kondisi kinerja keuangan BPKH pada bulan April 2019 menunjukkan pergerakan positif, dimana terjadi peningkatan total aset sebesar 7,04%. Kenaikan tersebut tercermin dari nilai aset BPKH yang semula sebesar Rp112,93 triliun menjadi Rp120,88 triliun. Walaupun kondisi aset BPKH naik, tetapi tidak dengan kondisi dari dana kelolaan. Dana kelolaan BPKH seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mengalami penurunan sebesar Rp5,68 triliun. Hal ini disebabkan adanya proses transfer dana terkait adanya pembayaran BPIH ke Kementerian Agama.

Pada bulan April 2019, kegiatan lelang valuta asing (valas) USD/SAR belum dilakukan kembali. Untuk proses pembayaran BPIH ke Kementerian Agama, menggunakan hasil lelang pada periode triwulan I 2019.

Laporan Keuangan BPKH pada triwulan pertama tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

XI. Penutup

Laporan kinerja dan laporan keuangan bulan April ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Seluruh kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, baik yang didukung dengan anggaran maupun tidak, bertujuan untuk mendorong pencapaian target BPKH di tahun 2019.

Oleh karena itu, Badan Pelaksana akan memastikan bahwa seluruh proses kegiatan baik yang memiliki anggaran (RKAT) maupun yang tidak memiliki anggaran dilaksanakan sesuai dengan input dan output yang telah direncanakan, serta anggaran digunakan berdasar pada prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.